

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan transportasi karena transportasi dari waktu ke waktu terus berkembang. Pemanfaatan transportasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat, yakni manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat politis, manfaat kewilayahan, tetapi dibalik semua manfaat yang diatas mempunyai dampak negatif, dimana dengan adanya perkembangan transportasi, maka peningkatan jumlah transportasi semakin meningkat, dengan meningkatnya jumlah transportasi maka akan memunculkan oknum pelanggar parkir.

Oknum pelanggar Parkir melakukan kegiatan perparkiran di sembarang tempat, sehingga dapat menyebabkan kemacetan-kemacetan. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.

Peneliti disini mengobservasi di daerah Lembang yang mengalami kemacetan yang disebabkan oleh oknum pelanggra parkir untuk meraup keuntungan, adanya pelanggaran parkir dikarenakan meningkatnya volume kendaraan yang tanpa di iringi dengan persediaan lahan parkir oleh pemerintah maupun pihak yang terkait, maka hal ini akan menyebabkan timbulnya oknum-oknum yang memanfaatkan bahu jalan untuk di jadikan lahan parkir yang akan

mengakibatkan kemacetan sepanjang jalan Kecamatan Lembang dan selain itu akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah setempat.

Banyak Pelanggan parkir beroperasi di daerah Lembang tepatnya sekitaran bundaran Lembang sampai dengan Cikole dan di Pasar Kayu Ambon, hasil pengamatan peneliti mengamati aktivitas yang terjadi di lokasi dimana banyak oknum perparkiran yang tidak memakai seragam resmi yang di sebut parkir liar.

Lokasi beroperasinya oknum parkir tersebut adalah jalan yang berada tepat di daerah Lembang, khususnya dari Bundaran Lembang sampai Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang. Peneliti meneliti di tiga lokasi tersebut berdasarkan arahan dari Kepala Seksi perparkiran dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, beliau mengatakan bahwa Tiga lokasi di daerah Lembang yang lokasi perparkirannya ataupun juru parkirnya belum terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat. Realitas ini pun membuat peneliti semakin tertarik untuk menyelaminya lebih jauh dan lebih dalam berkenaan dengan pelanggan parkir di lokasi tersebut. Hal-hal tersebut peneliti dapatkan melalui observasi kelapangan untuk melihat keunikan pelanggan parkir ini.

Sebenarnya perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Pelanggan parkir ini menimbulkan permasalahan tanpa mampu memberikan sumbangan yang positif, terlebih pelanggan parkir sekitar daerah kecamatan Lembang. Oleh karna itu pelanggan parkir ini dapat menjadi suatu yang menarik untuk di kaji. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor roda

dua (2) dan kendaraan bermotor roda empat (4). Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.

Hasil observasi awal tentang pelanggar parkir, peneliti menanyakan apa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh juru parkir, disini beliau mengatakan diantaranya, adanya marka jalan serta rambu-rambu parkir. Oknum juru parkir pun berseragam, adanya karcis dan mengantongi surat tugas dari Dinas Perhubungan. Di luar itu, berarti pelaku pelanggar parkir. Sebenarnya Dinas Perhubungan, melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindaklanjuti ketidaklancaran lalu lintas tersebut dengan menertibkan para oknum pelanggra parkir i yang mengintruksikan kendaraan bermotor baik roda dua (2) atau roda empat (4) untuk parkir di bahu jalan di daerah Kecamatan Lembang khususnya dari bundaran Lembang sampai Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang, Kabupaten Bandung Barat,. Penertiban yang dilakukan tidak membuat jera para oknum pelanggra parkir, karena lokasi parkir yang terbatas Mereka kembali menggunakan bahu jalan dalam melakukan kegiatan parkir.

Menurut hasil survei awal juga yang dilakukan oleh peneliti dimana yang di ungkapkan oleh bapak Suryo selaku seksi perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 2018 tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor rata rata di Kabupaten Bandung Barat, mencapai sekitar 20% setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan.

Kepala seksi perparkiran Dinas Perhubungan Kabupten Bandung Barat mengatakan bahwa Lahan parkir juga menjadi suatu masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Selain lahan parkir yang menjadi masalah, bapak Suryo juga mengungkapkan para oknum pelanggra parkir juga menjadi masalah karna seharusnya juru parkir (jukir) perparkiran bisa di lakukan apa apabila seseorang tersebut sudah mendaftar dan terdaftar di Dinas Perhubungan dan mengantongi surat tugas dari Dinas Perhubungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adisasmita dan Adisasmita (2011:70-71) dengan konsep *traffic is a function of buildings*, terdapat hubungan tidak positif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas. Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan permasalahan yang muncul adalah dimana kendaraan yang tidak mungkin bergerak terus menerus.

Berdasarkan jurnal tersebut peneliti menganalisa mempunyai kesamaan apa yang terjadi di daerah kecamatan Lembang yang tidak memungkinkan kendaraan akan berhenti untuk sementara atau berhenti cukup lama dikarnakan adanya Pasar dimana tempat transaksi perdagangan atau berbagai jual-beli, karna sepanjang jalan daerah lembang selain pusat perdagangan makanan khas Sunda, ataupun oleh-oleh khas Kota Bandung, daerah Lembang juga daerah yang edentik dengan nuansa wisata yang cukup menarik seperti : Wisata Tangkupan Perahu, *De'Ranch*, Gunung

Putri Lembang, *Floating Market*, Grafika Cikole, untuk di kunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun laur negeri, sehingga membangkitan oknum pelanggar parkir di daerah atau kawasan wisata maupun kawasan perdagangan di daerah Lembang.

Banyaknya kendaraan yang berhenti untuk melakukan transaksi itu juga menjadi penyebab munculnya oknum pelanggar parkir didaerah tersebut dan dengan kurangnya lahan parkir sehingga banyak pengguna kendaraan melakukan parkir di bahu jalan (*on-street parking*) yang di siapkan oleh oknum oknum pelanggar parkir. Tentu hal-hal tersebut akan menyebabkan kemacetan dengan adanya lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*).

Penelitian yang dilakukan oleh Agusniar Rizka Luthfia membahas tentang Kuasa Aktor dalam “Dunia Parkir Liar (Studi Kasus Kuasa Aktor dalam Dunia) (2013 : 52) “ Parkir L 3 Jurnal penelitian yang berkaitan dengan minimnya lahan parkir telah dilakukan oleh Pri Guna Nugraha, yang berjudul Studi tentang “Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda” penelitian ini menjelaskan bahwa kenyamanan dalam pelaksanaan parkir belum maksimal lantaran terbatasnya lahan parkir yang disediakan pemerintah yang memiliki kapasitas tinggi karena merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Kota Samarinda belum memberikan sarana dan parasarana yang nyaman terhadap pengguna parkir karena lahan parkir yang tidak memadai dan belum terealisasi.

Peneliti mencoba melihat apa yang dialami kota samarinda, hal tersebut juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Akibat dari berbagai

Pembangunan pusat Perekonomian atau pembangunan Wisata yang berada di daerah Lembang tanpa menyediakan sarana dan parasarana yang nyaman terhadap pengguna parkir karna lahan parkir yang terbatas maka muncul lah adanya oknum-oknum pelanggar parkir yang memanfaatkan keadaan tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu ada pada teori penelitian dimana penelitian terdahulu memakai teori Jones (1993) dalam Masnun (2009:8-9) sedangkan penelitian ini memakai teori Lobolo (2010).

Kemacetan yang di timbulkan oleh oknum-oknum pelanggar parkir mengakibatkan adanya ketidaklancaran lalu lintas. Kemacetan tersebut cukup mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Apalagi kita ketahui Lembang adalah tempat yang menarik untuk di kunjungi oleh wisatawan, dan Lembang adalah salah satu jalan yang di lewati para wisatawan untuk menuju ke berbagai tempat wisata. Selain kemacetan di daerah Lembang yang di sebabkan adanya oknum pelanggar parkir di daerah Lembang juga ada Pasar dimana Pasar tempat transaksi perdagangan atau transaksi jual-beli.

Kemacetan yang terjadi di daerah Lembang khususnya dari bundaran Lembang sampai Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang. selain adanya oknum pelanggar parkir juga di sebabkan dengan banyaknya wisatawan sebelum menuju ke tempat wisata terlebih dahulu membeli berbagai kebutuhan selama melakukan perjalanan wisata sehingga melakukan pemberhentian kendaraan, dan disinilah banyaknya oknum yang memanfaatkan keadaan ini dengan memarkirkan kendaraan wisatawan dibahu jalan sehingga terjadinya kemacetan di daerah Lembang.

Menurut Kepala Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat didalam berita Pikiran Rakyat tanggal 21 Februari 2017, Kepala Bidang Dinas Perhubungan mengatakan “ bahwa oknum pelanggar parkir di beberapa titik, salah satunya beliau menyebutkan di daerah lembang bahwa oknum pelanggar parkir sering meresahkan masyarakat ”. (<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/02/21/parkir-liar-di-kbb-segera-ditertibkan-394151>)

Berdasarkan pernyataan kepala bidang teknis dan prasarana diatas peneliti berusaha untuk mendalami masalah-masalah yang disebabkan oleh oknum pelanggar parkir yang mempunyai dampak negatif sehingga dapat menyebabkan keresahan di Masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Lembang.

Dalam jurnal penelitian terdahulu Aditya Wisnu Priambodo tentang Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang tahun 2012-2013, penelitian ini membahas masalah parkir liar telah menjadi penyebab hilangnya pendapatan daerah, juru parkir liar menerapkan tarif parkir tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan Aditya Wisnu Priambodo sama membahas oknum pelanggar parkir yang menyebabkan kemacetan dan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditya Wisnu Priambodo menghasilkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki perparkiran Kota Semarang, namun upaya-upaya tersebut cenderung tidak menemukan hasil yang positif karna banyak dipengaruhi kepentingan. Dalam penelitian tersebut bahkan Tarif parkir yang ditetapkan suatu daerah dengan daerah

lainnya dapat berbeda-beda. Dilihat dari kemampuan dan kebutuhan masing-masing dari suatu daerah. Penyelewengan tarif parkir yang terjadi di suatu daerah, yang dilakukan oleh oknum pelanggar parkir merugikan pemerintah daerah. Tarif parkir yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan Perda atau Perwali sangat merugikan kas daerah.

Berdasarkan Jurnal diatas dalam pengelolaan parkir di jalan umum, peneliti mencari kesamaan yang terjadi Kabupaten Bandung Barat, tarif parkir mengalami perubahan tidak resmi oleh pihak tertentu yang terjadi di Kota Semarang juga terjadi di daerah Lembang, memarkirkan kendaraan di jalan umu, dan kesamaan keduanya sama mekai metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu terletak pada teori penelitian, penelitian terdahulu memakai teori menurut Rivai (2006) dan penelitian sekarang memakai teori Lobolo (2010) persamaian juga dialami mengenai tarif parkir yang berubah-ubah setiap harinya yang di lakukan oknum pelanggar parkir di semarang tidak terjadi di daerah Lembang, di daerah tarif parkir akan berubah-ubah ketika ada acara yang cukup besar yang di adakan di daerah lembang.

Penyebab oknum pelanggar parkir di daerah Lembang akibat tempatnya cukup strategis khususnya dari bundaran Lembang sampai Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang, Kabupaten Bandung Barat, apalagi saat ada jadwal libur panjang akan banyak muncul tukang parkir dadakan yang membuka lahan parkir di pinggir jalan untung mencari keuntungan dari wisatawan.

Keberadaan oknum pelanggar parkir yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harusnya ditanggapi dengan cepat. Pemerintah kota hendaknya

persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas. Penanggulangan oknum pelanggar parkir oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Oknum pelanggar parkir sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada.

Sebenarnya Fenomena oknum pelanggar parkir yang beroperasi di sepanjang daerah Lembang khususnya dari bundaran Lembang sampai Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sudah beroperasi cukup lama, banyaknya oknum pelanggar parkir yang memakai bahu jalan untuk menjadi lahan parkir untuk meraup keuntungan sendiri sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan di jalan-jalan tersebut.

Hasil observasi peneliti tentang oknum pelanggar parkir, peneliti menemui suatu masalah dalam organisasi di Dinas Perhubungan, dikarenakan hasil observasi peneliti ke kantor Satpol PP bahwa Aparatur Satpol PP menyatakan belum ada kerjasama dalam penertiban parkir ilegal dengan pihak Dinas Perhubungan, dimana seharusnya dalam penertiban oknum pelanggar parkir Dinas Perhubungan harus menjalin hubungan kerjasama dengan dinas terkait seperti Satpol PP untuk mencegah beroverasinya oknum pelanggar parkir di Kecamatan Lembang.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, memerlukan suatu strategi yang berperan baik dalam menanggulangi oknum pelanggar parkir di daerah Lembang Kabupaten Bandung Barat. maka pemerintah yang terkait seperti Dinas

Perhubungan di tuntut untuk mengatasi dengan melakukan penertiban terhadap oknum pelanggar parkir. Berdasarkan konsep pembelajaran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di atur dalam Perbup No 18 Tahun 2011 Tentang Perda No 5 Tahun 2010 Pasal 106-123 tentang penyelenggaraan perparkiran, dan dilakukan oleh Aparatur yang berkompeten dan mempunyai kewenangan dibidang perparkiran. oknum pelanggar parkir ini akan menjadi suatu masalah yang serius apabila tidak di tertibkan untuk mengikuti aturan yang ada, dan oknum pelanggar parkir juga bisa mengakibatkan kekacauan jika tidak cepat dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti meneliti peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat melalui dari peran dalam melakukan penertiban oknum pelanggar parkir yang terjadi di daerah Lembang, khususnya di tiga tempat yaitu di Bundaran Lembang sampai Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang, dikarenakan tata kelola perparkiran menjadi kendala yang menyangkut tugas pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan munculnya oknum pelanggar parkir di Kabupaten Bandung barat, di daerah Lembang.

Berkenaan dengan regulasi perparkiran, setidaknya ada dua Peraturan Daerah yang terkait dengan regulasi perparkiran, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat ” (Suatu Studi Tentang Penertiban

Pelanggar Parkir di Kecamatan Lembang). Berdasarkan penelitian di beberapa Daerah seperti yang dijelaskan di atas menjadi pendukung penulis untuk melakukan penelitian lanjutan terkait Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam menertibkan parkir ilegal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan penertiban oknum pelanggar parkir di Kecamatan Lembang ?

.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui menganalisis peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam menertibkan oknum pelanggar parkir di Lembang, khususnya seperti di Bundaran Lembang, Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran sebagai regulasi atau sebagai pembuatan kebijakan dalam pengaturan perparkiran.
2. Untuk mengetahui peran fasilitas atau sebagai penyedia pasilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam menanggulangi oknum pelanggar parkir di Kecamatan Lembang.

3. Untuk mengetahui peran dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat. dalam pengawasan ini yaitu pengawasan dari kebijakan serta pengawasan sarana dan prasarana.
4. Untuk mengetahui ketanggapan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam menertibkan oknum pelanggar parkir di Kecamatan Lembang, khususnya di Tiga (3) lokasi seperti di Bundaran Lembang, Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi kegunaan teoritis, penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat berguna untuk Ilmu Pemerintahan sesuai bidang ilmu yang dipelajari yang mana penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala baik hambatan, tantangan, dan gangguan dalam proses pelaksanaan penelitian dan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam menertibkan oknum pelanggar parkir di di Lembang khususnya di Tiga (3) tempat seperti di Bundaran Lembang, Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang.

b. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom

Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan untuk pengembangan teori-teori pada Program Studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan permasalahan dalam usulan penelitian ini khususnya mengenai Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam menertibkan oknum pelanggar parkir di di Lembang khususnya di Tiga (3) tempat seperti di Bundaran Lembang, Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang.

b. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini semoga memberikan kegunaan untuk menambah wawasan, ilmu, dan pemahaman terhadap peran dari aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan dalam hal ini adalah memberi kenyamanan kepada masyarakat dalam perparkiran dengan Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan oknum pelanggar parkir dan masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat berlalu lintas lainnya.

b. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat

Semoga penelitian yang telah peneliti lakukan dapat memberikan dampak positif bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Barat kedepannya dalam menangani masalah-masalah baik terkait oknum pelanggar Parkir maupun masalah lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk memberikan kegunaan untuk menambah wawasan, ilmu, dan pemahaman terhadap permasalahan perparkiran dan ketertiban berlalu lintas.